



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan birokrasi, netral, profesional dan mampu melayani publik secara pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, akuntabel prima untuk mendukung daerah yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat maka diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Disegn* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagai tindak lanjut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
8. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah periode 2016-2021.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI; dan

BAB V PENUTUP.

- (2) Uraian secara rinci Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah menetapkan rencana dan target reformasi birokrasi setiap tahun, yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Nopember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016-2021

URAIAN SECARA RINCI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

BAB I
PENDAHULUAN

Buruknya citra birokrasi pemerintahan dimata masyarakat ditandai dengan munculnya berbagai tanggapan masyarakat bahwa birokrasi itu bertele-tele, tidak efisien, rentan praktek KKN, organisasi yang terlalu besar dengan etos kerja dan disiplin aparatur yang kurang baik, mendesak untuk segera dilaksanakannya Reformasi Birokrasi pemerintahan secara nasional baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi merupakan suatu langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta menjadi pendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Namun dalam perjalanannya pelaksanaan reformasi birokrasi masih tersendat-sendat dan jauh dari harapan. Masih rendahnya komitmen dan belum terfokusnya pelaksanaan reformasi birokrasi, memerlukan pembaharuan dan pemetaan kembali berbagai permasalahan dan langkah-langkah kongkrit dalam upaya percepatan pencapaian sesuai dengan amanah reformasi birokrasi itu sendiri.

Sebagai salah satu tonggak penting yang menandai telah berprosesnya pelaksanaan perbaikan dan pembenahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah yaitu dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dimana Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Road Map menjadi penting karena sangat diperlukan sebagai :

- a. Instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya.
- b. Instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.
- d. Dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi bagi setiap Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangli merupakan keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu sesuai dengan sasaran dari Reformasi Birokrasi itu sendiri, sehingga birokrasi Pemerintahan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada

masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja Pemerintah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangli, disusun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai rencana teknis dan rinci mengenai perubahan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangli dalam kurun waktu lima tahun mendatang, mulai dari tahun 2016-2021. Adapun penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam memenuhi keinginan dimaksud. Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Bangli saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Adapun Sistematika Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Ringkasan Eksekutif, berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program dan kegiatan, quick wins, dan criteria keberhasilan yang ditetapkan.
- b. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang mengapa Road Map perlu untuk disusun, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Road Map serta sistematika penyusunan.
- c. Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah, menjelaskan gambaran umum kondisi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangli yang dikaitkan dengan sasaran reformasi birokrasi, hal-hal yang telah dicapai dengan baik, harapan pemangku kepentingan serta hambatan dan permasalahan yang ada.
- d. Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang fokus perubahan reformasi birokrasi, prioritas pembenahan manajemen pemerintahan, prioritas yang harus dipertahankan/dikembangkan, prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, Sasaran, serta jабaran program/kegiatan sebagai implementasi dari fokus dan prioritas reformasi birokrasi yang diharapkan.
- e. Bab IV Monitoring dan Evaluasi, menjelaskan bagaimana teknik, waktu pelaksanaan, serta siapa penanggungjawab atas monitoring yang akan dilakukan.
- f. Bab V Penutup, menjelaskan simpulan dari Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli

Pemerintah Kabupaten Bangli pada dasarnya telah melakukan upaya serta langkah-langkah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, termasuk upaya peningkatan

kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, upaya serta langkah-langkah yang dilakukan belumlah maksimal dan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistematis, yang mampu menampung kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Dimana kondisi birokrasi masih terkendala didalam permasalahan klasik birokrasi yang secara umum ada di Indonesia, seperti masih adanya organisasi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien, duplikasi tugas dan fungsi, penempatan dan sebaran pegawai yang belum merata sesuai kebutuhan, kualitas pelayanan yang belum maksimal sehingga belum dapat memenuhi harapan masyarakat, masih rendahnya kualitas serta disiplin pegawai, masih adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan permasalahan-permasalahan lainnya yang membawa dampak menurunnya kepercayaan dan penilaian masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap birokrasi pemerintahan. Dari berbagai permasalahan tersebut maka secara nasional muncul kebijakan reformasi birokrasi yang memiliki tiga sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
3. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi seperti yang disebutkan diatas, perlu ditentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, maka terlebih dahulu dilaksanakan identifikasi terhadap kondisi umum birokrasi yang ada saat ini pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai Pemerintah Kabupaten Bangli dengan baik, sebagai berikut :

1. BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2016.
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara Negara, seluruh pejabat yang diwajibkan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli, telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
3. Pemerintah Kabupaten Bangli juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Implementasi E-Government berbasis teknologi informasi melalui tampilan website : <http://www.banglikab.go.id>. yang menampilkan profil Kabupaten Bangli, berbagai informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.
5. Akan dibukanya sarana pengaduan dan saran masyarakat secara online.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan.
2. Melaksanakan pelayanan publik.
3. Meningkatkan Penduduk yang tertib administrasi.
4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam hal tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan program Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
2. Dalam Penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Pemerintah Kabupaten Bangli memperoleh Nilai Cukup "CC".
3. Berdasarkan Pengukuran terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana yang tersaji didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2016 menunjukkan rata-rata tingkat capaian indikator yang cukup memuaskan.

Dari berbagai hal-hal yang sudah dicapai tersebut, diharapkan terus dapat dipertahankan bahkan dikembangkan kearah yang lebih baik lagi. Selain itu dengan tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi, nantinya diharapkan sasaran utama reformasi birokrasi khususnya di Kabupaten Bangli dapat terwujud dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan serta peningkatan kinerja yang secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bangli.

Dari pencapaian kinerja yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bangli, perlu diidentifikasi pula kondisi reformasi birokrasi yang menjadi kebutuhan/harapan pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar terjadi sinergi antara kebijakan reformasi yang akan diambil dengan fokus yang menjadi kebutuhan daripada pemangku kepentingan.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, Mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, dapat diidentifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Dari harapan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
2. Pemimpin daerah, termasuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
3. Penegakan hukum secara tegas untuk mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik.
4. Transparansi laporan keuangan daerah serta menurunnya penyimpangan yang terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
5. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Bangli, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan motivasi kerja sekaligus mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi, mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan, dapat diidentifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan serta fasilitas umum/sosial di berbagai lokasi baik itu dipusat kota maupun di daerah perdesaan.
2. Perubahan budaya melayani pada seluruh Perangkat Daerah terutama pada unit pelayanan. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

3. Dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik di kabupaten Bangli .
4. Adanya penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
5. Tersedianya dan terselenggaranya fasilitas pelayanan yang diperuntukan kepada mereka yang berkebutuhan khusus.
6. Seluruh pelayanan perijinan dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sedangkan kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dapat diidentifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bangli.
2. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum, dan petugas yang melayani.
3. Dari Pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan :
 - a. Peningkatan kualitas laporan kinerja instansi pemerintah sehingga memperoleh nilai B.
 - b. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif.
 - c. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan aturan yang berlaku
 - d. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik.
 - e. Ketersediaan sistem data pegawai yang mutakhir dan akurat.
 - f. Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel.

B. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Dari berbagai kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan seperti yang telah teridentifikasi diatas, terdapat hal penting dalam mewujudkan harapan tersebut yaitu dengan mengidentifikasi juga permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
2. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
3. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang

tugasnya.

4. Masih rendahnya etos kerja dan disiplin pegawai.
5. Kesejahteraan Pegawai di Kabupaten Bangli masih rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali, dimana dapat berimplikasi pada menurunnya motivasi kerja pegawai.
6. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PD.
7. Secara kualitas dan kuantitas aparat pengawas pada Pemerintah Kabupaten Bangli masih kurang, terlebih lagi untuk mendukung dalam rangka mempertahankan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan, menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan, sehingga kemungkinan masih akan menimbulkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bangli.
2. Penyediaan Pelayanan Perijinan secara On-line belum bisa direalisasikan, terkait dengan kendala pendanaan, sarana- prasarana, maupun kesiapan petugas/personil operasional.
3. Belum sepenuhnya unit kerja yang memberikan pelayanan melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.
2. Penerimaan dan penempatan pegawai belum sesuai kebutuhan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
3. Pelaksanaan dan pemanfaatan analisis jabatan dan analisis beban kerja belum sepenuhnya digunakan sebagai kajian dalam pembentukan maupun pengisian organisasi.
4. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum berjalan secara Optimal.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangli difokuskan pada lima Prioritas yang meliputi : Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara, Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi. Fokus perubahan ini bersifat generik, artinya menjadi permasalahan umum yang harus dipecahkan bersama secara internal oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, dari berbagai hal yang telah dicapai, permasalahan dan harapan dari pemangku kepentingan,

maka diperoleh fokus perubahan sesuai dengan kerangka area perubahan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pembenahan pada Pemerintah Kabupaten Bangli dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia Aparatur.

Berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam area ini antara lain:

- 1) Pejabat struktural, Eselon IV dan Eselon III banyak yang belum mengikuti Diklat Pim sesuai jenjang jabatannya.
- 2) Tenaga fungsional untuk mendukung Tupoksi masih kurang.
- 3) Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik.
- 4) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki.
- 5) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki OPD.
- 6) Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja.
- 7) Proses seleksi, penerimaan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.
- 8) Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 9) Rendahnya pemahaman terhadap aturan-aturan dibidang jasa konstruksi.
- 10) Sampai saat ini masih banyaknya pejabat yang menduduki jabatan belum memiliki diklat jabatan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Provinsi Bali.
- 11) Tuntutan ekonomi masyarakat meningkat pola pikir sudah berubah, waktu adalah uang sekarang setiap bekerja harus diperhitungkan dengan uang.
- 12) Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan meliputi :
 - a) Masih kurangnya tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan.
 - b) Belum terpenuhinya rasio tenaga fungsional perencanaan.
 - c) Belum optimalnya sistem penyediaan data base untuk perencanaan pembangunan.
- 13) Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a) Belum berkembangnya penelitian daerah.
 - b) Belum adanya tenaga fungsional peneliti.

b) Pengawasan

Berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam area ini antara lain:

- 1) Masih adanya temuan penyimpangan/kasus di OPD.
- 2) Masih terbatasnya pemahaman OPD terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa hal yang menjadi pembenahan atau perubahan dalam rangka penguatan Pengawasan, sebagai berikut :

- 1) Telah dilakukan pembinaan, pengawasan/pemeriksaan secara berkala (reguler) dimasing-masing OPD.

- 2) Terlaksananya sosialisasi dan konsultasi masing-masing OPD terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Penguatan Akuntabilitas.

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

- 1) Pelaporan belum tepat waktu dan kurang berkualitas.
- 2) Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan meliputi :
 - a) Masih rendahnya tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan.
 - b) Kurangnya data pendukung yang valid dan realible.
 - c) Belum terpenuhinya rasio tenaga fungsional perencanaan.
- 3) Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a) Belum berkembangnya penelitian daerah.
 - b) Belum adanya tenaga fungsional peneliti.

Terkait dengan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa hal yang menjadi pembenahan atau perubahan dalam rangka penguatan Akuntabilitas Kinerja, sebagai berikut :

- 1) Dilakukan Pengendalian Administrasi yang lebih intensif ke masing-masing Perangkat Daerah.
 - 2) Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencanaan kualitas dokumen perencanaan.
 - 3) Mewujudkan data yang berkualitas.
 - 4) Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencana.
 - 5) Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a) Peningkatan kualitas dokumen penelitian/kajian .
 - b) Perlu adanya tenaga fungsional peneliti.
- d) Penataan Peraturan Perundang-undangan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

- 1) Awig-awig merupakan sumber hukum adat sehingga lebih banyak dalam bentuk tidak tertulis.
- 2) Kurangnya anggaran dan Sumber Daya Manusia yang memahami IT.
- 3) Adanya pelanggaran hukum.
- 4) Kurangnya sosialisasi serta tidak adanya sarana publik yang dapat mengakses produk-produk hukum daerah yang sudah terbentuk secara terbuka.
- 5) Kurangnya minat baca masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku.
- 6) Kurang akses yang dimiliki masyarakat untuk dapat mengetahui produk-produk hukum baru .

Terkait dengan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa hal yang menjadi pembenahan atau perubahan dibidang Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Lebih banyak mengadakan pembinaan awig-awig kepada banjar pakraman dalam desa pakraman di Kabupaten Bangli .
- 2) Pengajuan anggaran dan peningkatan SDM.
- 3) Pengajuan anggaran dan peningkatan SDM untuk membangun aplikasi pengelolaan produk hukum secara elektronik.
- 4) Mengadakan lomba keluarga sadar hukum untuk bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- 5) Lebih sering melakukan sosialisasi terhadap produk hukum baru.

e) Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

- 1) Belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan/pasar.
- 2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar dan penataan pedagang kaki lima.
- 3) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha baik dibidang teknik produksi maupun manajemen (Efisiensi dan produktifitas belum optimal).
- 4) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha.
- 5) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha baik dalam mengakses informasi pasar dan permodalan.
- 6) Terbatasnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi mutu, SNI,HKI dll.
- 7) Terbatasnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen.
- 8) Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana kemetrolgian.
- 9) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha di bidang kemetrolgian.
- 10) Terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk memasarkan produk melalui IT.
- 11) Masih terjadinya disparitas harga bahan pokok dan barang strategis lainnya.
- 12) Pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa menurun.
- 13) Penguasaan peraturan perundang-undangan tentang ormas masih kurang.
- 14) Sosialisasi undang-undang pemilukada, pilpres, legislatif.
- 15) Program kegiatan berjalan dengan lancar.

Terkait dengan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa hal yang menjadi pembenahan atau perubahan dibidang Tatalaksana, sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dan mengembangkan sarana pasar tradisional maupun penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.
- 2) Melaksanakan pengawasan barang dan jasa, BDKT (barang dalam keadaan terbungkus), Perijinan Perdagangan maupun kemetrolgian.
- 3) Melaksanakan pelatihan-pelatihan IKM baik itu pelatihan peningkatan mutu maupun design.
- 4) Melaksanakan pameran-pameran pengembangan sistem inovasi teknologi industri dengan memfasilitasi Web.
- 5) Memberikan kesempatan Aparatur untuk mengikuti pelatihan/kursus baik bersifat teknis maupun manajemen dan memposisikan aparatur sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 6) Sosialisasi digalakkan.
- 7) Mengusulkan Diklat Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana.
- 8) Mengadakan lomba cerdas cermat dibidang wawasan kebangsaan.
- 9) Sosialisasi pembauran kebangsaan dan undang-undang ormas.
- 10) Sosialisasi persyaratan administrasi bantuan parpol.

- 11) Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan.
- f) Penataan dan Penguatan Organisasi
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :
- 1) Struktur Organisasi belum terealisasi sesuai kebutuhan.
 - 2) Kompetensi Aparatur belum sesuai dengan kebutuhan Struktur Organisasi.
 - 3) Sarana dan Prasarana seperti Gedung, Meubelair, masih belum memadai.
- Terkait dengan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa hal yang menjadi pembenahan atau perubahan dalam penguatan dan penataan organisasi, sebagai berikut :
- 1) Mengusulkan pengisian struktur
 - 2) Mengusulkan diklat aparatur.
 - 3) Mengusulkan Pembangunan Gedung dan Meubelair yang memadai.
 - 4) Sarana Operasional (SIM Pendapatan, SIMDA, SIM BUD) yang memadai.
- g) Pelayanan Publik
Berbagai permasalahan di bagian ini antara lain:
1. Tidak semua informasi kegiatan di ketahui.
 2. Belum maksimalnya kualitas pelayan publik.
 3. Masih banyak penduduk yang belum tertib administrasi.
 4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- Terkait dengan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa hal yang menjadi pembenahan atau perubahan dalam pelayanan publik, sebagai berikut :
1. Dilakukan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah.
 2. Terlaksananya pelayanan publik yang prima sesuai dengan SOP.
 3. Membina masyarakat dalam hal administrasi kependudukan.
- h) Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) Aparatur.
Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :
1. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli.
 2. Belum terpenuhinya rasio tenaga profesional perencana
 3. Belum optimalnya sistem penyediaan data base untuk perencanaan pembangunan.
 4. Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian pengembangan.
 5. Belum berkembangnya penelitian daerah.
 6. Belum adanya tenaga fungsional peneliti.
- Terkait dengan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa hal yang menjadi pembenahan atau perubahan dalam Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) Aparatur, sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten/kota melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
 2. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencana.
 3. Adanya Komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencana pembangunan daerah.

4. Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian pengembangan.
 5. Peningkatan kualitas dokumen/penelitian.
 6. Perlu adanya tenaga fungsional peneliti.
2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara
- Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan berbagai hal yang sudah baik. Dalam rangka pemeliharaan atau peningkatan hal-hal yang sudah dicapai dimaksud, maka prioritas yang harus terus dipelihara meliputi:
- a. Mempertahankan Opini WTP dari BPK;
 - b. Pemenuhan Kewajiban bagi Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK;
 - c. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

B. KEGIATAN-KEGIATAN

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah kedepan
 - a) Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - 1) Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB).
 - 2) Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK).
 - 3) Penyusunan standar kompetensi jabatan.
 - 4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja.
 - 5) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat.
 - 6) Penyelenggaraan diklat yang berkualitas dalam rangka peningkatan kompetensi (termasuk Auditor, Guru, Tenaga Kesehatan, pengelola keuangan, pengelola barang).
 - 7) Penataan Data Base Pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - 8) Pelaksanaan seleksi terbuka terhadap jabatan pimpinan tertinggi.
 - 9) Assesment Pegawai.
 - 10) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
 - 11) Penyusunan rencana pengembangan kepribadian role model
 - 12) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program peningkatan manajemen SDM Aparatur.
 - b) Pengawasan
 - 1) Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).
 - 2) Pengembangan Auditor, P2UPD melalui diklat dan pelatihan.
 - 3) Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah.
 - 4) Sosialisasi tertib administrasi keuangan.
 - 5) Monitoring pengelolaan keuangan di OPD.
 - 6) Pembentukan kebijakan pengaduan masyarakat sebagai sarana penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN.
 - 7) Mengevaluasi SOP pengawasan.
 - 8) Review Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 9) Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli.

- 10) Penyusunan Kebijakan Penanganan Gratifikasi di Kabupaten Bangli.
 - c) Akuntabilitas
 - 1) Review Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
 - 2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dan Kabupaten berbasis outcome.
 - 3) Pembentukan Sistem dan Petugas Pengelola Data Kinerja.
 - 4) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai (sistem manajemen kinerja pegawai).
 - 5) Peningkatan kualitas petugas penyusun Laporan Kinerja melalui bimtek dan seminar.
 - 6) Peningkatan kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui bimtek.
 - 7) Asistensi Penyusunan LKjIP OPD dan PEMKAB.
 - d) Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Penyusunan sistem/pedoman pengendalian penyusunan peraturan perundangan pada tingkat kabupaten yang mensyaratkan langkah-langkah yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan peraturan perundangan seperti, Rapat Koordinasi, Naskah Akademik dan Paraf Koordinasi.
 - 2) Pelaksanaan Bintek penyusunan peraturan perundangan (Legal Drafting).
 - 3) Evaluasi terhadap peraturan yang tidak harmonis/tidak sinkron.
 - 4) Penyusunan kebijakan/peraturan terkait sebagai pendukung program yang ditetapkan sebagai Quik Wins.
 - e) Tatalaksana
 - 1) Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan.
 - 2) Peraturan Bupati tentang SOP.
 - 3) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program penataan Tatalaksana.
 - f) Organisasi
 - 1) Penataan dan Penguatan Organisasi.
 - 2) Pemetaan permasalahan tugas pokok dan fungsi pada SKPD
2. Prioritas yang harus terus dipelihara
- a) Mempertahankan Opini WTP dari BPK
 - 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Pelaksanaan sosialisasi tertib administrasi keuangan.
 - 3) Meningkatkan kompetensi petugas pengelola keuangan dan pengelola barang milik negara.
 - 4) Pelaksanaan monitoring.
 - 5) Melakukan evaluasi dan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi.
 - b) Meningkatkan Pejabat yang telah menyerahkan LHKPN.
 - 1) Pelaksanaan sosialisasi tentang LHKPN dan LHKASN.
 - 2) Fasilitasi pembimbingan pengisian LHKASN kepada seluruh pegawai .
 - 3) Fasilitasi pembimbingan pengisian LHKPN kepada wajib lapor dan Penyelenggara Negara.
 - 4) Memonitor Penyerahan LHKPN dan LHKASN.

- c) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan Puskesmas, yang mampu melayani pasien rawat inap pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bangli.
 - d) Meningkatnya Pelaksanaan E-Procurement, melalui LPSE.
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.
- a) Pendidikan.
 - 1) Peningkatan Kompetensi Guru.
 - 2) Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar.
 - b) Kesehatan
 - 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan kesehatan lingkungan.
 - c) Perijinan
 - 1) Pengkajian penerapan PTSP.
 - 2) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan dan pemasangan standar pelayanan, maklumat pelayanan, SOP, kode etik, motto dan pengelolaan pengaduan).
 - 3) Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pendidikan, perijinan, kesehatan, sarana dan prasarana).
 - 4) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan.
 - 5) Penerapan keterbukaan informasi publik.
 - 6) pemberian pelayanan akses internet gratis pada tempat-tempat strategis.

C. RENCANA AKSI

Berdasarkan atas kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya disusun rencana aksi yang berisi detail seluruh program, kegiatan, sub kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, penanggung jawab dan sumber daya (keuangan dan manusia) yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip jelas (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), realistis (*realistic*), dan memiliki kerangka waktu yang nyata (*time-bound*). Adapun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dijabarkan pada Tabel Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program. Dalam kaitannya dengan program reformasi birokrasi, kegiatan monitoring dilaksanakan dalam rangka mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi yang setepat-tepatnya terhadap pelaksanaan program, dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan rencana yang sudah disusun. Sedangkan sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program, dan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program.

Adapun monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Bangli sedianya akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari beberapa OPD. Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan metode dan mekanisme sebagai berikut :

1. Metodologi Monitoring

a. Instrumen

Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrumen monitoring yang digunakan dalam hal ini adalah berupa formulir yang berisi daftar dan *check list* kegiatan oleh tim/ kelompok kerja reformasi birokrasi kabupaten.

b. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrumen monitoring dalam rangka memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktivitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktivitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Format formulir adalah sebagai berikut :

Aktivitas	Kriteria Sukses	% Target	Waktu (Triwulan)				Capaian		Ket.
			I	II	III	IV	Sudah	belum	

2. Mekanisme Monitoring

Dari instrumen monitoring berupa formulir dengan metode *check list* sebagaimana contoh diatas, selanjutnya mekanisme kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan yang dilaksanakan baik itu melalui Observasi, Wawancara maupun rapat rutin monitoring dan evaluasi setiap enam bulan (semester).

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan menilai hasil dari suatu kegiatan baik yang sedang atau sudah dilaksanakan. Perlunya pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan reformasi birokrasi, tujuan evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Sedangkan sasaran evaluasi adalah mendorong transparansi proses pelaksanaan program, dan untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksana program bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap tahun kegiatan yaitu pada masa akhir pelaksanaan kegiatan. Sebagai pelaksana evaluasi adalah Tim Kabupaten. Melalui survey indeks kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

1. Rapat Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
2. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi.
Laporan disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan selama satu tahun kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi selama satu tahun kegiatan, termasuk juga didalamnya rekomendasi yang isinya berupa saran dan masukan yang dirumuskan sebagai penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan performa birokrasi yang bersih dan melayani sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi itu sendiri yaitu menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Upaya mereformasi birokrasi merupakan upaya yang dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan baik waktu, tenaga dan pikiran, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.

Dalam kerangka mewujudkan semuanya itu, terdapat lima faktor sebagai penentu kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun faktor yang pertama adalah “Kemauan dan Komitmen Politik”, dimana kemauan politik (*political will*) dan komitmen politik (*political commitment*) yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

Faktor yang kedua adalah “Kesamaan Persepsi dan Tujuan”, dimana diperlukan adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur negara bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

Faktor yang ke tiga adalah “Konsistensi dan Keberlanjutan”, konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi disini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Faktor yang ke empat adalah “Ketersediaan Anggaran”, reformasi birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Faktor yang terakhir adalah “Dukungan Masyarakat”, reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan sistem control yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau dan organisasi masyarakat.

Reformasi birokrasi tidak dapat ditunda lagi, oleh karena itu hanya dengan tekad, kerja keras dan komitmen yang tinggi dari seluruh lapisan aparatur negara yang akan mampu melahirkan perubahan ke arah perbaikan.

Sebagai bentuk langkah awal dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yaitu dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangli 2016-2020, yang merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, dimana didalamnya terdapat sasaran, rencana aksi dan target-target yang ditetapkan dengan memperhitungkan harapan-harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menjawab harapan dimaksud. Meskipun didalam rencana aksi telah diuraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya tidak menutup terciptanya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dan inovatif dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang mungkin timbul dan memerlukan langkah strategis dan inovatif untuk pemecahannya. Karena itu kedepan fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bangli akan terus berupaya membangun tata pemerintahan yang baik, dengan salah satunya berkomitmen untuk melaksanakan amanat reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Bangli harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang lebih baik.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 41 TAHUN 2019
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 TAHUN 2016-2021

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organisasi						
1	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.	1. Perangkat Daerah dalam bentuk Badan yang terdiri dari:	1. Untuk dapat berpungsi lancar, semua Struktur Organisasi agar diisi, sesuai struktur yang ada	1. Struktur Organisasi belum terealisasi sesuai kebutuhan yaitu:	1. Mengusulkan pengisian struktur		
		- 1 Sekretariat 6 Badan		- 2 (dua) Eselon III masih kosong			
				- 4 (empat) Eselon IV masih kosong.			
		1. Jumlah Pejabat	2. Penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan Organisasi.	2. Kompetensi Aparatur belum sesuai dengan kebutuhan Struktur Organisasi.	2. Mengusulkan diklat aparatur.		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Eselon II/b					
		- Eselon III/a					
		- Eselon IV/a					
		2. Pendidikan Aparatur (SDM)	3. Besaran Organisasi disesuaikan dengan Lokasi/dan sarana prasarana pendukung.	3. Sarana dan Prasarana seperti Gedung, Meubelair, masih belum memadai.	3. Mengusulkan Pembangunan Gedung dan Meubelair, yang memadai		
		- 8 (delapan) orang S2			4. Sarana Operasional (SIM Pendapatan, SIMDA, SIM BUD) yang memadai		
		- 7 (tujuh) orang S1					
		- 6 (enam) orang D3					
		- 43 orang SMA					
		- 1 (satu) orang SMP					
		- Selain sebagai OPD, juga sebagai PPKD.					
2	Tatalaksana						
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	1. Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	1. Rendahnya kesadaran pengelola	1. Mengadakan pembinaan lembaga koperasi		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		kompetitif	koperasi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku			
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A. Perdagangan	- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan	- Belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan /pasar	- Menyediakan dan Mengembangkan sarana pasar tradisional maupun penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	- Pasar Kidul sebagai Pasar Tertib Ukur tahun 2014	Dari Kementerian Perdagangan
		1. Prog. Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan : 100%	1. Meningkatkan Kesadaran/Ketertarikan pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang-undangan	1. Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar dan penataan pedagang kaki lima	1. Melaksanakan pengawasan barang dan jasa, BDKT (barang dalam keadaan terbungkus), Perijinan Perdagangan maupun kemetrolgian	- Pasar Kintamani dan Kayuambua sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2016	
		2. Prog.	2. Meningkatkan	2. Terbatasnya	2. Melaksanakan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor : 1,90 %	Mutu Produk	kemampuan pelaku usaha baik dibidang teknik produksi maupun manajemen (Efisiensi dan produktifitas belum optimal)	pelatihan-pelatihan IKM baik itu pelatihan peningkatan mutu maupun design		
		3. Prog. Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri : 99,69 %	3. Meningkatkan Akses Pemasaran	3. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha	3. Melaksanakan pameran-pameran pengembangan sistem inovasi teknologi industri dengan memfasilitasi Web		
		4. Prog. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	4. Meningkatkan Kualitas Aparatur	4. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha baik dalam mengakses informasi pasar dan permodalan	4. Memberikan kesempatan Aparatur untuk mengikuti pelatihan/kursus baik bersifat teknis maupun manajemen dan memposisikan aparatur sesuai dengan jenjang pendidikan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		B. Perindustrian		- Terbatasnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi mutu, SNI, HKI dll	Sosialisasi digalakkan		
		1. Prog. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi : 17,24 %		1. Terbatasnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen	Sosialisasi digalakkan		
		2. Prog. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 35,11 %		2. Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana kemetropolitan	Mengusulkan Diklat Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana		
		3. Prog. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri : 1,67 %		3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha di bidang kemetropolitan	Sosialisasi digalakkan		
		4. Prog.		4. Terbatasnya	Sosialisasi dan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial : 16,78 %		kemampuan pelaku usaha untuk memasarkan produk melalui IT	Pelatihan digalakkan		
		Isu-isu Strategis		- Masih terjadinya disparitas harga bahan pokok dan barang strategis lainnya			
		1. Rendahnya sarana dan prasarana perdagangan					
		2. Rendahnya kesadaran/ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan					
		3. Rendahnya mutu produk					
		4. Rendahnya Akses pemasaran					
		5. Rendahnya kualitas Aparatur					
3	Badan Kesatuan	Target kinerja yang	1. Meningkatnya	1. Kesadaran	1. Mengadakan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli	harus di capai 5 tahun kedepan 65,73 %	kwalitas hidup masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan dengan berdasarkan Tri Hita Karana dengan teknologi modern.	ormas untuk mengurus SKT sangat kurang.	lomba cerdas cermat dibidang wawasan kebangsaan.		
		Masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli adalah :	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.	2. Pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa menurun.	2. Sosialisasi pembauran kebangsaan dan undang-undang ormas.		
		1. Pemahaman masyarakat akan nilai-nilai hulu budaya bangsa masih kurang	3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ormas dan pembauran kebangsaan	3. Penguasaan peraturan perundang-undangan tentang ormas masih kurang.	3. Sosialisasi persyaratan administrasi bantuan parpol.		
		2. Kesadaran Ormas untuk mendaftarkan diri serta untuk mendapatkan SKT masih rendah	4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kerukunan umat beragama.	4. Sosialisasi undang-undang pemilukada, pilpres, legislatif.			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	5. Melakukan sosialisai dan desiminasi kesadaran bela Negara.				
		4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat tentang kesadaran Bela Negara	6. Melakukan sosialisasi dan koordinasi forum-forum diskusi politik				
		5. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu masih kurang	7. Melaksanakan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu serta penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol.				
		6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan administrasi bantuan partai politik	Program kegiatan berjalan dengan lancar	Program kegiatan berjalan dengan lancar	Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan		
3	Peraturan Perundang-undangan						
1	Bagian Hukum	1. Masih banyaknya	1. Semua awig-awig	1. Awig-awig	1. Lebih banyak		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan HAM	awig-awig banjar pakraman dalam desa pakraman yang belum tertulis	banjar pakraman dalam desa pakraman bisa dibuat dalam bentuk tertulis	merupakan sumber hukum adat sehingga lebih banyak dalam bentuk tidak tertulis	mengadaan pembinaan awig-awig kepada banjar pakraman dalam desa pakraman di Kabupaten Bangli		
		2. Bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka semua produk hukum daerah harus berspektif HAM	2. Produk hukum daerah yang berspektif HAM	2. Kurangnya kesadaran mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia	2. Penyebaran spanduk dan sosialisasi mengenai Hak Asasi Manusia		
2	Bagian Hukum dan HAM	1. Belum tersedianya Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam rangka transparansi publik di Kabupaten Bangli	1. Sistem pengelolaan dokumentasi hukum secara elektronik	1. Kurangnya anggaran dan Sumber Daya Manusia yang memahami IT	1. Pengajuan anggaran dan peningkatan SDM		
3	Bag. Hukum dan HAM	1. Prosentase kesesuaian produk hukum daerah	1. Semua produk hukum daerah tidak	1. Sulitnya akses untuk mengetahui	1. Pengajuan anggaran dan peningkatan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		dengan Peraturan Perundang-undangan, kepentingan umum, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia	bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia	perkembangan, posisi dan keberadaan rancangan produk hukum dalam proses administrasi di Bagian Hukum	SDM untuk membangun aplikasi pengelolaan produk hukum secara elektronik		
			Adanya sistem pengelolaan produk hukum secara elektronik				
		2. Persentase pemahaman kesadaran hukum masyarakat masih rendah	2. Masyarakat lebih sadar hukum	2. Adanya pelanggaran hukum	2. Mengadakan lomba keluarga sadar hukum untuk bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat		
		3. Penginformasian produk-produk hukum yang terbentuk dalam 1 tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli belum maksimal.	3. Dapat memberikan informasi hukum kepada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	3. Kurangnya sosialisasi serta tidak adanya sarana publik yang dapat mengakses produk-produk hukum daerah	3. Mencetak buku lembaran daerah dan mengirimkannya kepada Perangkat Daerah di Lingkungan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bangli	yang sudah terbentuk secara terbuka.	Pemerintah Kabupaten Bangli		
		4. Permasalahan hukum dalam pemerintahan semakin kompleks sehingga pemerintah juga perlu didampingi oleh Tim yang dapat memberikan pendapat hukum (Legal Opinion).	4. Bisa diberikannya pendampingan dan pendapat hukum (legal opinion) terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli	4. Kebijakan pemerintah berpeluang untuk tidak diterima, dimasalahkan bahkan digugat oleh masyarakat	4. Dibentuk Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Bangli		
		5. Pemahaman masyarakat terhadap hukum masih rendah	5. semua lapisan masyarakat mengetahui dan memahami hukum	5. Kurangnya minat baca masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku	5. Lebih sering melakukan sosialisasi terhadap produk hukum baru		
				6. Kurang akses yang dimiliki masyarakat untuk dapat mengetahui produk-produk hukum baru			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sumber Daya Manusia Aparatur						
1	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP)	1. Secara kuantitas jumlah pegawai cukup, tetapi secara kualitas masih kurang.	1. Jumlah pegawai yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas.	1. Pejabat struktural, Eselon IV dan Eselon III banyak yang belum mengikuti Diklatpim sesuai jenjang jabatannya.	1. Mengusulkan Diklatpim bagi pejabat/calon pejabat.		
					2. Mengusulkan kebutuhan tenaga fungsional untuk menunjang penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas PD		
				2. Tenaga fungsional untuk mendukung Tupoksi masih kurang, seperti:			
				- Fungsional arsiparis tidak ada.			
				- Fungsional (3 jenis fungsional) untuk mendukung			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				urusan ketahanan pangan tidak ada.			
				- Fungsional Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) kurang, dan beberapa diantaranya menjelang pensiun.			
2	Bagian Pembangunan	1. %Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1. Meningkatnya kualitas sistem pengadaan secara elektronik sesuai dan peningkatan kualitas SDM, perangkat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik	1. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik	1. Diadakanya pelatihan-pelatihan/trainer yang berkaitan dengan sistem Pengadaan Secara Elektronik		
3	Inspektorat	1. Melaksanakan akuntabilitas	1. Meningkatnya akuntabilitas	1. Masih terbatasnya	1. Peningkatan SDM melalui		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		kinerja Inspektorat Kabupaten Bangli	kinerja Inspektorat Kabupaten Bangli	kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki	Pelatihan/diklat pendidikan		
		2. Melaksanakan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki OPD	2. Peningkatan SDM melalui pelatihan/diklat pendidikan di masing-masing OPD		
		3. Melaksanakan Pengawasan Intern Pemerintah	3. Meningkatnya APIP yang bersertifikasi	3. Masih terbatasnya APIP yang bersertifikasi	3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan APIP		
4	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM	1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum	1. Penerimaan CPNS dari jalur umum sesuai kebutuhan OPD	1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja	1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja		
		2. Tingkat ketidakhadiran masih relatif tinggi dan tingkat pemenuhan jam kerja masih rendah	2. Analisis beban kerja berjalan dengan optimal	2. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan Calon Pegawai	2. Peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Negeri Sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan			
		3. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi	3. Sistem Pengembangan karier PNS sesuai dengan kompetensi jabatan	3. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi	3. Penerimaan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan		
5	Bagian Pembangunan	1. % Meningkatnya kualitas kompetensi jasa konstruksi	1. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dalam memenuhi standar pengadaan	1. Rendahnya pemahaman terhadap aturan-aturan dibidang jasa konstruksi	1. Mengadakan Fasilitasi Pembinaan dibidang jasa konstruksi		
6	Dinas Koperasi,	1. Meningkatnya	1. Penciptaan	1. Rendahnya	1. Menyelenggara		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kinerja Koperasi, UMKM	. iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	SDM pengurus dalam mengelola koperasi	kan pelatihan tentang perkoperasian		
		2. Meningkatnya Cakupan Layanan Sosial Dasar	2 Pengembangan Usaha Koperasi	2. Rendahnya kemampuan KUMKM dalam mengikuti pengembangan usaha	2. a. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan tentang UKM	1. Kabupaten Bangli sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi Tahun 2015	
					b. Menyelenggarakan promosi produk UMKM	2. Peringkat: PARAMADHANA UTAMA NUGRAHA KOPERASI	
			3 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	3. Rendahnya kemampuan KUMKM untuk mengelola dan mengakses permodalan	3. Fasilitasi akses permodalan bagi UMKM		
			4 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	4. Rendahnya jiwa kewirausahaan dari	4. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				KUMKM dalam persaingan usaha			
			5 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	5. Rendahnya kesempatan kerja bagi pencari kerja di Kabupaten Bangli	5. a. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dan wirausaha bagi tenaga kerja muda		
					b. Mengadakan bursa informasi tenaga kerja		
			6 Peningkatan kesempatan kerja	6. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bangli	6. Menyelenggarakan program transmigrasi regional		
			7 Program transmigrasi regional				
7	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM	1. Anggaran pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai	1. Penanganan masalah disiplin PNS dapat diselesaikan dengan optimal	1. Sampai saat ini masih banyaknya pejabat yang menduduki jabatan belum	1. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuan dan peran serta masyarakat yang dapat lebih		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				memiliki diklat jabatan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Provinsi Bali	mempercepat penilaian kinerja BKDPSDM pada era globalisasi		
			2. Sistem Remunerasi pegawai berjalan dengan baik				
			3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai				
			4. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			kegiatan				
			5. Tersedianya anggaran untuk pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment)				
			6. Akuratnya database kepegawaian				
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)						
-	Bidang Pemerintahan Desa	1 Masih rendahnya kelembagaan Desa dinas, desa adat/desa pekraman dan banjar adat/banjar pekraman	1 Meningkatnya Kelembagaan Desa dinas, Desa Adat/Desa Pakraman dan Banjar Adat/Banjar Pakraman	1 Prosentase SDM Desa dan Banjar yang dibintek	1 Penguatan SDM Desa dan Banjar		
-	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1 Potensi Ekonomi Desa belum dimanfaatkan secara optimal, Dari 68 Desa di Kab. Bangli jumlah BUMDESA 22 dan 23 Pasar	1 Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi desa, dari 68 Desa di Kab. Bangli jumlah BUMDESA 55 dan meningkat	1 Belum merata pemahaman desa tentang Bumdesa Terbatasnya SDM Pengelola	1 Melaksanakan sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Bumdesa Melaksanakan Pembinaan Bumdesa dan	1. Beberapa Bumdesa sering mendapat kunjungan dari luar Daerah	

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Desa yang aktif	status pasar Desa	Lembaga Ekonomi Desa	pasar desa untuk meningkatnya status dari kurang, sedang dan baik		
						1. Bumdesa Pengotan	
						2. Bumdesa Bulan Palapa Desa landih. Bumdesa bersama pada 3 Kecamatan sudah dibentuk Kec. Bangli, Kec. Susut dan Tembuku Kec. Kintamani menunggu Perbup	
-	Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	1 Terjadi penurunan budaya gotong royong Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	1 Melestarikan nilai budaya Gotong royong dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Tuntutan ekonomi masyarakat meningkat Pola pikir sudah	1 Membangkitkan semangat gotong royong dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Meningkatnya Pembangunan Masyarakat yang	

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			dalam Pembangunan	berubah, waktu adalah uang sekarang setiap bekerja harus diperhitungkan dengan uang Rendahnya SDM Kader dan Masyarakat	Meningkatnya SDM Kader dan Masyarakat	sejahtera	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Isu-isu strategis :		1 Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan meliputi :			
		1 Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana program pembangunan	1 Optimalisasi data sistem informasi pembangunan daerah	1 Masih rendahnya tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan	1 Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencanaan kualitas		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					dokumen perencana		
		2 Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencana	2 Mengikuti Diklat Perencanaan	2 Kurangnya data pendukung yang valid dan realible	2 Mewujudkan data yang berkualitas		
		3 Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian/kajian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan.	3 Adanya dokumen hasil penelitian/kajian sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan	3 Belum terpenuhinya rasio tenaga fungsional perencana	3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencana		
		4 Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang litbang	4 Perlu adanya tenaga fungsional peneliti	4 Belum optimalnya sistem penyediaan data base untuk perencanaan pembangunan	4 Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencanaan pembangunan daerah		
				5 Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan	5 Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :	daerah penelitian dan pengembangan meliputi :		
				- Belum berkembangnya penelitian daerah	6 Peningkatan kualitas dokumen penelitian/kajian		
				- Belum adanya tenaga fungsional peneliti	7 Perlu adanya tenaga fungsional peneliti		
		Target Kinerja :	Target Kinerja :				
		1 Persentase jumlah dokumen master plan pengembangan wilayah strategis (21,25%)	1 Kesesuaian RPJMD dengan RKPD (80%)				
		2 Kesesuaian RPJMD dengan RKPD (75%)	2 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen (70%)				
		3 Persentase usulan	3 Persentase				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen RKPD (65%)	dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		4 Persentase peningkatan kualitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (75%)	4 Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang soial dan budaya yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		5 Persentase jumlah Perda tentang Perencanaan dan Keuangan Daerah (100%)	5 Persentase dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh yang ditindaklanjuti				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		6 Cakupan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (18,33%)	6 Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		7 Persentase jumlah dokumen perencanaan sosial budaya (18,49%)	7 Jumlah dokumen laporan RAD HAM (100%)				
			8 Persentase dokumen perencanaan yang disusun				
5	Pengawasan						
1	Bagian Pembangunan	1. % Meningkatnya kualitas sistem pelaporan tingkat partisipasi	1 Laporan yang tepat waktu dan berkualitas	1. Kurang partisipasi masyarakat dalam	1. Dilakukannya Monitoring ke desa-desa		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		masyarakat dalam pembangunan		pencatatan laporan pembangunan swadaya murni			
2	Inspektorat	1. Terlaksananya pemeriksaan berindikasi kasus tindak pidana korupsi	1. Menurunnya temuan pemeriksaan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi	1. masih adanya temuan penyimpangan/kasus di OPD	1. Telah dilakukan pembinaan, pengawasan/pemeriksaan secara berkala (reguler) dimasing-masing OPD dan penyerapan SPIP dimasing-masing OPD		
3	Inspektorat	1. Melaksanakan kepatuhan OPD terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	1. Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	1. Masih terbatasnya pemahaman OPD terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	1. Terlaksananya sosialisasi dan konsultasi masing-masing OPD terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		
6	Akuntabilitas						
1	Bagian Pembangunan	1. % Meningkatnya kualitas sistem	1. Laporan yang tepat waktu dan	1. Pelaporan belum tepat	1. Dilakukan Pengendalian		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		pelaporan capaian kinerja dan keuangan	berkualitas terhadap capaian Kinerja dan keuangan	waktu dan kurang berkualitas	Administrasi yang lebih intensif ke masing-masing Perangkat Daerah		
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Isu-isu strategis :		1 Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintahan daerah perencana meliputi :			
		1 Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana program pembangunan	1 Optimalisasi data sistem informasi pembangunan daerah	1 Masih rendahnya tingkat konsistensi antara dokumen perencana	1 Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencanaan kualitas dokumen perencana		
		2 Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencana	2 Mengikuti Diklat Perencanaan	2 Kurangnya data pendukung yang valid dan realible	2 Mewujudkan data yang berkualitas		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian/kajian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan.	3 Adanya dokumen hasil penelitian/kajian sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan	3 Belum terpenuhinya rasio tenaga fungsional perencana	3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencana		
		4 Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang litbang	4 Perlu adanya tenaga fungsional peneliti	4 Belum optimalnya sistem penyediaan data base untuk perencanaan pembangunan	4 Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencanaan pembangunan daerah		
				5 Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :	5 Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :		
				6 Belum	6 Peningkatan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				berkembangnya penelitian daerah	kualitas dokumen penelitian/kajian		
				7 Belum adanya tenaga fungsional peneliti	7 Perlu adanya tenaga fungsional peneliti		
		Target Kinerja :	Target Kinerja :				
		1 Persentase jumlah dokumen master plan pengembangan wilayah strategis (21,25%)	1 Kesesuaian RPJMD dengan RKPD (80%)				
		2 Kesesuaian RPJMD dengan RKPD (75%)	2 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen (70%)				
		3 Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen RKPD (65%)	3 Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti dalam				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			pelaksanaan pembangunan (100%)				
		4 Persentase peningkatan kualitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (75%)	4 Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang soial dan budaya yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		5 Persentase jumlah Perda tentang Perencanaan dan Keuangan Daerah (100%)	5 Persentase dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		6 Cakupan dokumen perencanaan	6 Persentase dokumen perencanaan				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		pembangunan ekonomi (18,33%)	prasarana wilayah dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		7 Persentase jumlah dokumen perencanaan sosial budaya (18,49%)	7 Jumlah dokumen laporan RAD HAM (100%)				
			8 Persentase dokumen perencanaan yang disusun				
7	Pelayanan Publik						
1	Bagian Pembangunan	1. Penyebar luasan informasi kegiatan pembangunan	1 Diketuinya . Kegiatan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bangli	1. Tidak semua informasi kegiatan di ketahui masyarakat	1. Dilakukan fasilitasi kegiatan pembangunan Daerah		
2	Inspektorat	1. Melaksanakan pelayanan publik	1 Meningkatkan . kualitas pelayanan publik	1. Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik	1. Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima sesuai dengan SOP		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kecamatan Susut	1. Meningkatnya Penduduk yang tertib administrasi	1. Penduduk yang tertib administrasi	1. Masih banyak Penduduk yang belum tertib Administrasi	1. Membina Masyarakat dalam hal administrasi Kependudukan	Semua Penghargaan dan Juara yang diraih merupakan Koordinasi serta bimbingan dari Kecamatan	
		2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2. Desa yang diberdayakan dalam menciptakan Lingkungan Sehat	2. Masih Kurangnya peran Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2. Membina Masyarakat dalam hal Keamanan dan Kenyamanan	- Piagam Penghargaan Desa Sadar Hukum Desa Penglumbaran Dari Menteri Hukum dan HAM	
		3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3. Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	3. Membina Masyarakat dalam hal Kebersihan Lingkungan	1 Juara III Tingkat Nasional Hari Kesatuan Gerak PKK	
						2 Juara III Tingkat Provinsi	

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Lomba KB Lestari	
						3 Juara I Tingkat Kabupaten Lomba Kader Penyuluh UP2K PKK	
						4 Juara I Tingkat Kabupaten Lomba PHBS dengan cerdas	
						5 Juara I Tingkat Kabupaten Lomba Kader Penyuluh Pola Asuh Anak	
4	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangli	- Persentase Peningkatan Jumlah LPD Sehat (61,63%)	- Persentase Peningkatan Jumlah LPD Sehat (69,81%)	- Masih rendahnya pemahaman Masyarakat tentang Lembaga Keuangan Mikro utamanya LPD,		Juara 1 Stand Terbaik Katagori Kabupaten dalam EVENT NUSANTARA	

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				padahal lembaga ini dapat di jadikan mitra untuk mengembangkan usaha produktif		EXPO & FORUM 2016 dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah Tanggal 19 - 23 Oktober 2016	
		- Persentase UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya (0,13%)	- Persentase UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya (0,70%)	- Banyaknya kelompok ekonomi produktif yang belum berbadan hukum sehingga menghambat pemberian bantuan			
		- Persentase Inflasi di Provinsi Bali (3,23 %)	- Persentase Inflasi di Provinsi Bali (\pm 4%)	- Kurangnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya sehingga terjadi kelangkaan barang dipasaran			
		- Persentase Petani	- Persentase	- Sebagian besar			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Anggota (KTNA) yang Berprestasi (1,41%)	Petani Anggota (KTNA) yang Berprestasi (2,02%)	petani, nelayan belum memahami informasi, pengalaman serta pengembangan kerjasama antar petani nelayan dan petani hutan dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan			
		- Persentase Kawasan yang kualitas Lingkungan Baik (12%)	- Persentase Kawasan yang kualitas Lingkungan Baik (75%)	- Masih rendahnya masyarakat dalam menjaga lingkungan yang baik			
		- Persentase Peningkatan Investasi dan Deviden di Kab. Bangli (9%)	- Persentase Peningkatan Investasi dan Deviden di Kab. Bangli (23%)	- Belum Optimalnya informasi timbal balik baik dari masyarakat produsen, konsumen buyer maupun investor			
				- Rendahnya dukungan-			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				dukungan modal Pemkab Bangli pada BUMN Kabupaten Bangli			
5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Isu-isu strategis yang dihadapi :	1 Indeks kualitas lingkungan meningkat dari tahun ke tahun	1. Pencemaran badan air (sungai dan danau) dan tanah akibat pembuangan limbah komersial dan sampah	Dilakukan/ dilaksanakan melalui kegiatan :	1 Tahun 2015 meraih sertifikat Adipura	
		1. Lemahnya penanganan manajemen lingkungan			1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	2 Tahun 2016 meraih Tropi Adipura Buana	
		Target Kinerja 5 Tahun Kedepan	2 Penanganan pengelolaan sampah menjadi optimal	2. Menurunnya kualitas udara	2. Pemantauan kualitas lingkungan		
		1. Indeks Kualitas Lingkungan :		3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	3. Pengelolaan B3 dan limbah B3		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Tahun 2016 : 60,5 - 62,5		4. Kerusakan lahan akibat penggalan pada kawasan yang berfungsi lindung	4. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih		
		- Tahun 2017 : 62,5 - 64,5		5. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan	5. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air		
		- Tahun 2018 : 64,5 - 66,5		6. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	6. Pengendalian dampak perubahan iklim		
		- Tahun 2019 : 66,5 - 68,5			7. Koordinasi program kampung iklim		
		- Tahun 2020 : 68,5 - 70,5			8. Pengujian emisi kendaraan bermotor		
		- Tahun 2021 : 70,5 - 72,5			9. Penataan RTH		
					10. Pemeliharaan RTH		
		2. Persentase Pengelolaan			11. Pengembangan taman rekreasi		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sampah :					
		- Tahun 2016 : 33%			12. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup		
		- Tahun 2017 : 37%			13. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)		
		- Tahun 2018 : 42%			14. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
		- Tahun 2019 : 47%			15. Koordinasi penyusunan AMDAL		
		- Tahun 2020 : 52%			16. Pengendalian keanekaragaman hayati dan ekosistem		
		- Tahun 2021 : 60%			17. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan		
					18. Bimbingan teknis		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					persampahan		
					19. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		
		Dilaksanakan melalui program :			20. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		
		1. Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			21. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		
		2. Perlindungan dan konservasi SDA			22. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA		
		3. Rehabilitasi dan pemulihan			23. Peningkatan edukasi dan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		cadangan SDA			komunikasi masyarakat di bidang lingkungan		
		4. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup			24. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		
		4. Peningkatan pengendalian polusi			25. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		
		5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			26. Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan		
		6. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan					
6	RSU/Masyarakat	1. Letak geografis perbukitan	1. Jarak jangkau RS dari tempat tinggal jauh	1. Pasien memilih kabupaten lain yg terdekat			
		2. Daya beli sebagian masyarakat bangli cukup baik dan dapat dijadikan	2. Masyarakat banyak berkunjung sebagai pasien	2. Bertambahnya pendapatan RS			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		target market	umum				
	RSU/ BPJS	1. Program BPJS sdh mengkaper sebagian besar masyarakat	1. Masyarakat datang ke rs dgn administrasi lengkap	1. Proses pengklaiman biaya perawatan lancar			
		2. Klaim BPJS Kecil	2. Semua kebutuhan perawatan pasien harus ditanggung RS	2. Klaim tidak mencukupi biaya operasional (RS merugi)			
	RSU/ Pelayanan (Pra Pelayanan)	1. Lokasi RS strategis ditengah- tengah kota Bangli	1. Rumah Sakit mudah dijangkau pasien	1. Pengguna jasa RS nyaman berkunjung ke RS			
		2. Merupakan pusat rujukan pasien Kabupaten Bangli	2. Pasien yg tidak bisa dilayani di PPK I atau puskesmas dirujuk ke RS	2. Kunjungan RS meningkat			
		3. Dikembangkan sebagai pusat pelayanan forensik wilayah timur dan layanan komplementer alternatif	3. Kasus yang perlu dilakukan otopsi forensik dirujuk ke RS bangli	3. Peningkatan pendapatan RS			
		4. Kondisi fisik bangunan RS baru	4. Ruangan pasien sangat nyaman	4. Pasien dan keluarga nyaman			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				dirawat di RS			
		5. Jumlah kunjungan pasien rawat inap & jalan cenderung meningkat	5. Fasilitas pelayanan dimanfaatkan secara maksimal	5. Pendapatan RS Meningkat			
		6. Pengembangan jenis pelayanan terus dilakukan	6. Jenis pelayanan dikembangkan sesuai standar RS Kelas B	6. Makin banyak variasi kasus yang dapat dilayani di RS Bangli			
		7. Tenaga medis spesialis yang lulus/akan lulus pendidikan semakin banyak dengan kopetensi yang berbeda	7. Tersedianya tenaga spesialis yang berkopeten	7. Makin banyak variasi kasus yang dapat dilayani di RS Bangli			
		8. Standar Farmasi dan terapi belum sepenuhnya mengadopsi kebutuhan pasien	8. Kebutuhan resep obat pasien tidak terpenuhi secara maksimal	8. Pasien beli obat ke apotik luar			
		9. KIO belum terlaksana secara optimal	9. Pasien mencari obat dengan resep	9. Jumlah stok obat pasien tidak terdeteksi			
		10. Ketepatan waktu pelayanan belum sesuai SPM	10. Pasien masih menunggu lama	10. Pasien pindah kefasilitas pelayanan lainnya			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		11. RS Bangli melayani pasien BPJS kesehatan secara maksimal	11. Banyak pasien BPJS berkunjung ke RS Bangli	11. Klaim BPJS meningkat			
		12. RS Bangli melayani pasien BPJS Tenaga Kerja	12. Bertambahnya kunjungan pasien BPJS ke RSU Bangli	12. Klaim BPJS meningkat			
		13. RS Bangli berkerjasama dengan BNN	13. Bertambahnya kunjungan pemeriksaan NAPZA	13. Meningkatnya pendapatan RS			
		14. RSU Bangli dilirik sebagai salah satu RS obyek studi banding oleh RS Pemerintah/Swasta	14. Banyaknya institusi studi banding ke RS Bangli	14. Meningkatnya pendapatan non pelayanan			
		15. Masih adanya Pendanaan oleh pemerintah pusat	15. Program RS terbiayai oleh dana APBN	15. Mempercepat program pengembangan RS			
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	A. Target Kinerja					
		- Angka Kematian Ibu (86,7)	- Angka Kematian Ibu (57)	- Pelayanan kesehatan untuk	- Peningkatan Mutu Pelayanan	- Tenaga Kesehatan Teladan	

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat masih terkendala mutu layanan	Kesehatan di FKTP	Tahun 2015 Tingkat Nasional	
		- Angka Kematian Bayi (6,5)	- Angka Kematian Bayi (5,7)	- Kekurangan jumlah, jenis dan mutu tenaga kesehatan	- Peningkatan usaha preventif dan promotif dan koordinasi LP/LS	- Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2016 Tingkat Nasional	
		- Angka Kematian Balita (7,8)	- Angka Kematian Balita (7)	- Meningkatnya penyakit menular yang disebabkan o/perilaku manusia dan penyakit tidak menular	- Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kebutuhan		
		- Persentase Gizi Buruk (< 5)	- Persentase Gizi Buruk (< 5)	- Masih kurangnya sarana & prasarana Yankes di Puskesmas & Jaringannya	- Peningkatan dan pemenuhan sarana & prasarana Yankes di Puskesmas Jaringannya		
				- Perilaku hidup bersih dan sehat	-		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				oleh masyarakat masih rendah			
		B. Isu - Isu Strategis					
		1 Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	- Angka Kematian Ibu (57), Angka Kematian Bayi (5,7)				
		2 Peningkatan perbaikan gizi	- Persentase Gizi Buruk (< 5)				
		3 Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	- Menurunnya penyakit menular dan tidak menular				
		4 Pencapaian MDG's dan Post 2015 menuju Indonesia Sehat	- Tercapainya MDG's dan Post 2015 menuju Indonesia Sehat				
		5 Implementasi JKN	- Terlaksananya JKN di 12 Puskesmas				
		6 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	- Terakreditasinya 12 Puskesmas di Kabupaten Bangli				
8	Dinas Sosial	3. Peningkatan pelayanan korban bencana	a Korban bencana dapat dilayani	- Bantuan Tanggap Darurat bagi Korban	- Penyediaan bantuan Tanggap darurat		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bencana			
				- Masih rendahnya antisipasi bencana	- Melaksanakan Kampung Siaga Bencana		
9	Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian	1. Melaksanakan tugas-tugas bidang komunikasi dan informasi statistik dan persandian	1 Terlaksananya tugas-tugas bidang komunikasi dan informasi statistik dan persandian	1. Belum optimalnya karena terbatasnya sarana dan prasarana termasuk SDM baik kualitas maupun kuantitasnya	1. Bimtek SDM, pengadaan sarana dan prasarana	1. Belum, karena baru terbentuk di tahun 2017 sesuai PP 18 tahun 2016	
10	Bagian Pembangunan	1 Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 Optimalnya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1 Kurang optimalnya pelayanan kedinasan	1 Dilakukan kunjungan kerja ke Desa/Kecamatan		
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP)	1. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bangli (PMA/PMDN).	1 Jumlah investor yang menanamkan modalnya di kabupaten bangli (PMA/PMDN): 393 Investor				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Meningkatkan jumlah nilai investasi	2. Meningkatnya jumlah nilai investasi (118,5 Milyar).	a. Isu Belum meratanya investasi antar wilayah kecamatan dan antar sektor karena belum optimalnya kajian dan perencanaan di bidang investasi dan penanaman modal.	1. Pemetaan dan Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Piagam Citra Pelayanan Prima dalam Peningkatan Pelayanan Publik dari Gubernur Bali Tahun 2013	
		3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		b. Isu Kurangnya informasi/promosi tentang pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah.	2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi		
				c. Lemahnya pengawasan dan pemantauan	3. Meningkatkan pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				terhadap kepatuhan dan kewajiban penanaman modal/pemilik izin sesuai peraturan yang berlaku.			
				d. Waktu pengurusan izin relatif lama, berbelit-belit dan tidak transparan karena belum memadainya Standar Operating Prosedure (SOP)	4. Penyesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan dan NSPK.		
				e. Biaya pengurusan izin relatif tinggi.	5. Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku pengenaan biaya sudah rasional.		
				f. Isu	6. Peningkatan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				terbatasnya sarana prasarana.	Sarana dan prasarana Mobilitas dan Kelengkapan Pelayanan.		
				g. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam pelayanan/ penanganan proses perizinan.	7. Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Diklat dan BinteK.		
12	Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1. Meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangli terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli.	1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok fungsi di masing-masing bagian	- Membuat angket untuk mengukur tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.		
					- Meningkatkan inovasi dari staf di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur		2. Kurangnya inovasi dari staf di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.	- Meningkatkan keterampilan staf dalam memanfaatkan sarana & prasarana yang ada.		
		3. Peningkatan Disiplin Aparatur.		3. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.			
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
		5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					
		6. Pelaksanaan Upacara Nasiona, Daerah dan Keagamaan					
		7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rumah Sakit Umum (RSU)/ Tempat Pendidikan dan praktek	1. Banyak lembaga pendidikan melakukan kerjasama dengan RS Bangli	1. Peserta praktek dapat membawa inovasi pelayanan sesuai perkembangan ilmu terkini	1. Kualitas pelayanan meningkat			
		2. Narasumber pelaksanaan diklat luar RS	2. Diadakan MOU dengan lembaga tempat narasumber bertugas	2. Pelaksanaan diklat In House Training			
	Sarpras (ASET)	1. Pencatatan aset belum menyeluruh	1. Tidak semua alat berisi logo dokumen pengadaan	1. Aset tidak terinventaris dengan baik			
		2. Barang Hibah belum diproses sesuai prosedur	2. Belum semua aset RS atas nama RSU Bangli	2. Mengurangi jumlah aset RS			
		3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	3. Belum maksimal tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas B	3. Tindakan disgnostik dan penunjang terhambat			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Bagian Umum Setda Kab. Bangli	1. Jumlah materai untuk keperluan KDH, WKDH dan Sekretariat yang tersedia : 135115 lembar	- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	- Belum memadainya sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah, KDH dan WKDH	- Menyediakan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah, KDH dan WKDH		
		2. Pembayaran rekening telepon, air dan listrik : 60 bulan	- Peningkatan nilai efisiensi/penggunaan anggaran yaitu ketersediaan anggaran yang proporsional kesesuaian RKA dengan Renstra dan Renja	- Belum optimalnya manajemen pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	- Melaksanakan pelatihan di bidang manajemen penyelenggaraan pemerintahan		
		3. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor : 7 jenis		- Belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan output dan outcome yang terukur dalam	- Penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan output dan outcome yang terukur		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				melaksanakan tugas			
		4. Asuransi barang milik daerah : 5 paket					
		5. Samsat kendaraan dinas/operasional : 5 tahun					
		6. Jasa petugas kebersihan dan perlengkapannya untuk di lingkungan kantor Sekretariat Daerah : 5 paket					
		7. Jasa petugas kebersihan di rumah jabatan dan jasa laundry keperluan KDH dan WKDH : 5 paket					
		8. Penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan Sekretariat Daerah : 5 paket					
		9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		untuk keperluan Sekretariat Daerah : 6 jenis					
		10. Penyediaan komponen alat-alat listrik untuk keperluan Rumah Jabatan dan Sekretariat Daerah : 16 jenis					
		11. Penyediaan peralatan rumah tangga untuk keperluan di Rumah Jabatan 38 jenis					
		12. Penyediaan buku-buku untuk keperluan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 80 buku					
		13. Pengisian tabung gas untuk keperluan rumah tangga rumah jabatan : 1952 tabung					
		14. Penyediaan makanan dan					

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		minuman untuk keperluan rapat : 5 tahun					
		15. Penyediaan bahan makanan dan minuman untuk keperluan rumah jabatan : 60 bulan					
		16. Perjalanan dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah : 5 tahun					
		17. Rehab total RJ Bupati dan Wakil Bupati : 2 unit					
		18. Pengadaan mobil jabatan : 2 unit					
		19. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) untuk keperluan operasional Pemkab Bangli : 54 unit					
		20. Pengadaan perlengkapan gedung kantor					

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		untuk keperluan rumah jabatan dan Sekretariat Daerah : 21 jenis					
		21. Penyediaan cindramata untuk tamu-tamu Pemkab Bangli : 8 jenis					
		22. Pemeliharaan rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 2 unit					
		23. Pemeliharaan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah : 10 unit					
		24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemkab Bangli : 20 jenis					
		25. Pemeliharaan peralatan di rumah jabatan : 8 jenis					
		26. Pemeliharaan peralatan gedung kantor di					

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		lingkungan Sekretariat Daerah : 6 jenis					
		27. Penyediaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta perlengkapannya : 90 stel					
		28. Penyediaan pakaian pakaian khusus hari-hari tertentu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 102 stel					
		29. Pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang : 60 bulan					
		30. Pembayaran honorarium non PNS dan iuran BPJS Kesehatan					

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah : 60 bulan					
		31. Kegiatan upacara keagamaan : 14 jenis					
		32. Pembayaran honorarium PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 60 bulan					
14	RSU/ Regulasi pemerintah dan PEMDA	1. Komitmen Bupati memajukan RS tinggi	1. Pendapatan RS dapat digunakan kembali sesuai aturan BLU	1. RS dapat mengembangkan pelayanan			
		2. Pemda memahami dan mau mengikuti sistem pengelolaan keuangan BLU	2. RS dapat merencanakan kegiatan sesuai kebutuhan saat ini dan mengalokasikan anggaran secara lebih efisien	2. Perencanaan anggaran lebih fleksibel			
		3. Pemerintah Provinsi	3. Banyak masyarakat	3. Masyarakat harus			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		menerapkan kebijakan Kepesertaan JKBM harus memiliki kartu	berobat tidak memiliki kartu JKBM	membayar panjer sehingga masyarakat komplain dgn RS			
		4. Pada tahun 2017 Kepesertaan JKBM akan bergabung dengan BPJS Kesehatan	4. Banyak masyarakat ekonomi lemah yang tidak terdaftar pada KK miskin	4. Ketidakmampuan daerah dan masyarakat untuk membayarkan premi BPJS			
	RSU/ Teknologi medis	1. Banyaknya perusahaan penyedia fasilitas KSO	1. Ada sistem KSO	1. Pengembangan pelayanan dgn modal sedikit			
		2. Jenis peralatan medis bisa kita upload pengadaan dari e- catalog	2. Pengadaan tdk berbelit dan RS bisa mengadakan Alked tanpa lelang	2. Terjadi efisiensi anggaran			
	RSU/ Manajemen	1. Master plan rumah sakit masih tumpang tindih	1. Perencanaan pengembangan gedung bangunan menjadi belum tepat	1. Pembangunan gedung bangunan menjadi kurang sesuai dengan master plan			
		2. Pola tarif rumah sakit belum direvisi	2. Tarif belum sesuai dengan unit cost	2. Target pendapatan belum terpenuhi			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				maksimal			
		3. Kamar ruang mahotama dan VVIP masih kurang	3. Masih banyak pasien antre diruangan mahotama dan VVIP	3. Pasien pindah ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya			
		4. Masih kurangnya peningkatan kompetensi tenaga ahli	4. Standar kompetensi belum sesuai dengan SPM	4. Pasien belum dilayani dengan kompetensi yang memadai			
		5. Telah tercapai peningkatan status RS	5. Standar biaya klaim BPJS meningkat	5. Pendapatan rumah sakit meningkat			
		6. Adanya kecenderungan peningkatan pendapatan	6. Tercapainya proyeksi pendapatan tiap tahunnya	6. PAD dari BLUD meningkat			
		7. Pengelolaan keuangan RS dengan PPK-BLUD	7. Terjadi fleksibilitas penggunaan anggaran	7. Terjadi efisiensi anggaran			
		8. Absensi Sidik jari	8. Monitornya tingkat kehadiran pegawai	8. Peningkatan disiplin pegawai			
		9. Billing terintegrasi	9. Memonitor pendapatan RS	9. Mengetahui pendapatan secara uptdate			
15	Dinas Perpustakaan	1. Program Pengembangan	1. Program Peningkatan	1. Kurangnya sarana dan	1. Pengadaan sarana dan	Prestasi yang pernah dicapai	

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Kearsipan Kabupaten Bangli	Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan	kualitas Sumber Daya Manusia(SDM)P engelola Perpustakaan	prasarana penunjang kegiatan	prasarana untuk mendukung program dan kegitan	dari hasil pembinaan dalam lomba perpustakaan tingkat propinsi	
		- Kegiatan Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah	- Kegiatan pembinaan pengelolaan perpustakaa n	2. Kurangnya sarana bahan pustaka	2. Pengadaan bahan pustaka	I. Tingkat SD	
		Target 10 sekolah	Target 30 perpustakaan	3. Kurangnya pemahaman SDM pengelola perpustakaan	3. Menyelenggara kan kegiatan bimtek pengelola perpustakaan sekolah/desa	- Tahun 2016 juara III lomba Gugug (SDN Catur)	
		- Kegiatan Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah	- Kegiatan Monitoring perpustakaan		4. Memberikan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan sekolah/desa	II. Tingkat SMP	
		Target 50 orang	Target 15 perpustakaan			- Tahun 2013 juara I (SMPN. 1 Bangli)	
		2. Program	- Kegiatan			- Tahun	

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	lomba pengelolaan perpustakaan			2014 juara harapan I (SMPN. 2 Bangli)	
		- Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Target 15 perpustakaan			- Tahun 2015 juara harapan I (SMPN. 2 Bangli)	
		Target 500 buah	- Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan			- Tahun 2016 juara III (SMPN. 1 Susut)	
			Target 50 orang			III. Tingkat SMA	
						- Tahun 2014 juara III (SMKN. 1 Bangli)	
						- Tahun 2016 juara III (SMAN. 1 Bangli)	
16	Dinas Kependudukan	Target kinerja yang harus di capai 5 tahun					

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.	kedepan 63,80 %					
		Masalah yang dihadapi Disdukcapil kabupaten Bangli tentang Administrasi kependudukan adalah :					
		1. Data kependudukan belum akurat pada saat dibutuhkan, data kependudukan adalah dasar pengambilan kebijakan.	1. Melaksanakan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil.	1. Kesadaran Masyarakat untuk mengurus dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih rendah.	1. Rapat-rapat Kerja Nasional/Bimbingan teknis.	Penghargaan WIKIA (Widya Kesuma Innovation Award) tahun 2016	
		2. Kesadaran penduduk untuk mengurus administrasi kependudukan masih rendah..	2. Meningkatkan pengolahan data kependudukan dan pencatatan Sipil sehingga pada saat dibutuhkan mudah ditemukan.	2. Pemahaman Penduduk/ masyarakat terhadap pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih rendah.	2. Pemeliharaan Perangkat SIAK.		
		3. Pemahaman	3. Melakukan	3. Kepemilikan	3. Penyusunan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		penduduk akan pentingnya administrasi kependudukan masih rendah.	sosialisasi kebijakan/pembinaan tentang Administrasi kependudukan sehingga kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pengurus administrasi Kependudukan semakin meningkat.	dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat Bangli masih rendah.	Profil Kependudukan		
		4. Kemampuan S D M untuk mengelola administrasi kependudukan eletronik masih terbatas.	4. Meningkatkan Bimbingan teknis (SDM) sehingga kemampuan SDM semakin baik.		4. Penyusunan Data Penduduk.		
		5. Belum tersedianya tenaga registrasi di tingkat Desa.			5. Pelayanan Langsung/Keliling Pendaftaran Penduduk/Kartu Tanda Penduduk (KTP) .		
		6. Masih Kurangnya partisipasi masyarakat dalam			6. Pelayanan Langsung /Keliling		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		proses akurasi data kependudukan.			Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga (KK) .		
		7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program Kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen Data kependudukan			7. Pelayanan Langsung/Keliling Pencatatan Sipil/ Akta Kelahiran.		
		8. Kemiskinan masih menjadi beban bagi Negara untuk melayani warga Negeranya menyelesaikan masalah.			8. Pelayanan Langsung/Keliling Pencatatan Sipil/ Akta Perkawinan dan Perceraian.		
					9. Pelayanan Langsung/Keliling Pencatatan Sipil/ Akta Perubahan status Anak,Pewarga Negeraan dan Kematian.		
					10. Sosialisasi Kebijakan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Administrasi Kependuduk.		
					11. Menyusun kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.		
17	Dinas Sosial	1. Menurunnya Angka Kemisknan	a Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	- Masih banyak masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak huni	- Melaksanakan Bedah Rumah terhadap RTM yang tinggal di rumah Tidak Layak Huni sampai saat ini berjumlah 1939		
			Dengan target 0,76%		- Pelatihan ketrampilan bagi warga miskin		
					- Pembinaan penumbuhan kelompok usaha bersama bagi KK Miskin		
			b Masih adanya keluarga miskin yang belum	- Masih adanya keluarga/ anak yang	- Melakukan Pertemuan Kelompok FDS		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			mampu membiayai pendidikan dan kesehatan	mengalami Gizi Buruk dan ada beberapa anak yang putus sekolah	(Family Defolevmen Sistem) disemua daerah yang menjadi peserta PKH. Sampai saat ini yang menerima bantuan 2266 KK		
		2. Meningkatnya cakupan Pelayanan Dasar	a Masyarakat mendapat Pelayanan Dasar dengan mudah utamanya KIS, KIP, KKS dan Rastra	- Masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki JKN-KIS, KIP, KKS dan Rastra terutama warga masyarakat miskin	- Sosialisasi JKN, KIS, KIP, KKS dan Rastra ke Desa dan Kecamatan		
					- Sudah 26,963 KIS yang terbit untuk KK Miskin yang diusulkan Dinas Sosial sampai bulan April Tahun		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					2016		
			b Meningkatkan Pelayanan PMKS,	- Masih adanya PMKS yang belum mendapat pelayanan	- Pembinaan bagi PMKS		
			Dengan target 17,40 %				
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli	Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengakibatkan penderitaan yang luar biasa, tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta benda tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis atau kejiwaan.	1. Tersedianya 1 Dokumen (50 buku) Rencana Penanganan Bencana.	1. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi penyebaran informasi potensi bencana	Berdasarkan isu-isu strategis penanggulangan bencana, maka yang menjadi dasar perumusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangli dengan mempertimbangkan :	-	-
		Mengingat dampak yang luar biasa tersebut, penanggulangan bencana harus dilakukan dengan tepat dan menyeluruh, tidak hanya pada saat bencana dan pasca bencana, tetapi juga	2. Tersedianya 1 Dokumen (50 buku) Rencana Kontinjensi setiap jenis ancaman.	2. Masih lemahnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB, Kontinjensi dan SOP)	1. Prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		pada saat sebelum terjadi bencana.			Penanggulangan Bencana.		
			3. Tersedianya 2 jenis Sarana Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS).	3. Kurangnya sarana Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS)	2. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.		
		Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Bangli Periode Tahun 2016 -2021 :	4. Terpeliharanya 7 jenis Sarana Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS).	4. Masih lemahnya kemampuan SDM para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	3. Anggaran yang disediakan dalam rangka perencanaan Penanggulangan Bencana.		
		- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	5. Terbentuknya 9 Sekolah Aman Bencana.	5. Lemahnya pendidikan kebencanaan secara dini	4. Koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara lintas sektoral.		
		- Program Penanganan Darurat Bencana	6. Terbentuknya 5 Desa Tangguh Bencana.	6. Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pra bencana	5. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.		
		- Program Rehabilitasi dan	7. Terlatihnya 540 orang Personil	7. Masih lemahnya sistem			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rekonstruksi Pasca Bencana	Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana.	penanganan darurat bencana agar tercapai penanganan yang cepat, tepat dan terpadu			
			8. Tersedianya 4 Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	8. Minimnya sarana dan prasarana kebencanaan	Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario penanggulangan bencana Kabupaten Bangli dengan asumsi sebagai berikut :		
		Adapun isu-isu strategis Penanggulangan Bencana:	9. Tertanganinya Kejadian Bencana di 4 Kecamatan dan 5 Tahun	9. Belum adanya penyediaan Sarana dan Logistik secara mandiri untuk cadangan bantuan darurat (sandang dan pangan) yang dilengkapi dengan Gudang Penyimpan	- Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat dusun.		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Logistik			
		1. Meningkatkan peran Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan : Review dan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).	10.Tersedianya 5 jenis Peralatan Penanganan Bencana	10. Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pra bencana	- Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada.		
		2. Review dan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi.	11.Tersedianya 1 jenis Logistik Penanganan Bencana	11. Belum adanya regulasi dalam rangka pemulihan pasca bencana dan perlunya pelayanan rehabilitasi (fisik dan psikologis) korban bencana secara tepat melalui bantuan korban bencana	- Penanganan sistem informasi kebencanaan yang terpusat di BPBD Kabupaten Bangli.		
			12.Terpeliharanya 12 jenis Peralatan Kebencanaan		- Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan peningkatan upaya pengurangan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Risiko Bencana dan peningkatan kapasitas.		
			13.Tersedianya 4 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Penanganan Darurat Bencana				
8	Pola Pikir (Mindset) dan Budaya Kerja (Culture set) Aparatur						
1	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM	1. Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)			1. Berupaya melaksanakan diklat untuk para pejabat yang belum melaksanakan diklat tetapi telah menduduki jabatan dan meningkatkan koordinasi dengan Badan Diklat yang memiliki akreditasi dalam hal ini Badan		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengembangan SDM Provinsi Bali		
2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bangli	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan manajemen maupun program 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurang tegas dan kurang jelasnya perturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas SDM dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangli 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten/kota melalui pendidikan, pelatihan dan 		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat		
				- Masih kurangnya pemahaman terhadap makna desentralisasi maupun deokratisasi	- Meningkatkan kelancaran pengadaan barang dan jasa		
				- Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri	- Meningkatnya SD di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah		
				- Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan			

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				keputusan dibidang pembangunan sehingga mengganggu proses penyelesaiannya			
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Isu-isu strategis :		1 Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintahan daerah perencana meliputi :			
3		1. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana program pembangunan	1. Optimalisasi data sistem informasi pembangunan daerah	1. Masih rendahnya tingkat konsistensi antara dokumen perencana	1. Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencanaan kualitas dokumen perencana		
		2. Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencana	2. Mengikuti Diklat Perencanaan	2. Kurangnya data pendukung yang valid dan realible	2. Mewujudkan data yang berkualitas		
		3. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil	3. Adanya dokumen hasil penelitian/kajian	3. Belum terpenuhinya rasio tenaga	3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		penelitian/kajian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan.	sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan	fungsional perencana	Perencana		
		4. Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang litbang	4. Perlu adanya tenaga fungsional peneliti	4. Belum optimalnya sistem penyediaan data base untuk perencanaan pembangunan	4. Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan data base perencanaan pembangunan daerah		
				5. Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :	5. Permasalahan pembangunan daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah penelitian dan pengembangan meliputi :		
				6. Belum berkembangnya penelitian daerah	6. Peningkatan kualitas dokumen penelitian/kajian		
				7. Belum adanya tenaga fungsional peneliti	7. Perlu adanya tenaga fungsional peneliti		

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Target Kinerja :	Target Kinerja :				
		1. Persentase jumlah dokumen master plan pengembangan wilayah strategis (21,25%)	1. Kesesuaian RPJMD dengan RKPD (80%)				
		2. Kesesuaian RPJMD dengan RKPD (75%)	2. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen (70%)				
		3. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen RKPD (65%)	3. Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		4. Persentase peningkatan kualitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (75%)	4. Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang soaial dan budaya yang ditindaklanjuti				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		5. Persentase jumlah Perda tentang Perencanaan dan Keuangan Daerah (100%)	5. Persentase dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		6. Cakupan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (18,33%)	6. Persentase dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan (100%)				
		7. Persentase jumlah dokumen	7. Jumlah dokumen laporan RAD				

NO	AREA PERUBAHAN	KONDISI ORGANISASI SAAT INI	KONDISI ORGANISASI YANG DIINGINKAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	RENCANA AKSI PERUBAHAN	PRESTASI ORGANISASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		perencanaan sosial budaya (18,49%)	HAM (100%)				
			8. Persentase dokumen perencanaan yang disusun				

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADI GIANYAR